



PENETAPAN

Nomor 563/Pdt.P/2022/PA.Bbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, lahir 21 Januari 1979 (umur 43 tahun), agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir 17 Januari 1983 (umur 39 tahun), agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor: 563/Pdt.P/2022/PA.Bbs tanggal 28 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung bernama XXXXXXXX, lahir 27 Juli 2007 (umur 15 tahun 03 bulan), Agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX, lahir 17 Maret 2000 (22 tahun 07 bulan), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 563/Pdt.P/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes dengan Surat Nomor XXXXXXXXXX tanggal 19 Oktober 2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya, yakni anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun bulan yang lalu, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga belum pernah berhubungan badan serta akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 November 2022, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga demikian dengan calon suami telah siap menjadi kepala keluarga dengan penghasilan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II setiap bulannya kurang lebih Rp.3.000.000,-- (Tiga Juta Rupiah) Sesuai dengan Surat Keterangan Penghasilan dari Desa Karangdempel, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes tanggal 20 Oktober 2022;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 563/Pdt.P/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (XXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan calon mempelai Pria dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai Pria yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan calon mempelai wanita serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah bermeterai

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 563/Pdt.P/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazzezel (bukti P.1);

2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan dinazzezel, (bukti P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, bermeteri cukup dan diazzezel (bukti P.3);
4. Fotokopy surat keterangan lahir anak Pemohon I dan Pemphon II bermeterai cukup dan dinazzezel, (bukti P.4);
5. Asli surat Penolakan Nikah KUA Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup dan dinazzezel (bukti P.5);
6. Fotokopy surat keterangan dokter Puskesmas Tanjung, bermeterai cukup dinazzezel, bukti P.6);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai Pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II memberikan keterangan sebagai berikut :

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai Pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara Calon mempelai wanita dengan calon mempelai Pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 563/Pdt.P/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Undang Undang nomor 16 tahun 2019 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Mawar saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi dipersidangan dan keterangan kedua calon mempelai bahwa mempelai wanita hamil serta keterangan para orang tua mereka ternyata bahwa hubungan antara kedua

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 563/Pdt.P/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai telah sedemikian akrabnya sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran agama yang berkelanjutan apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang bahwa calon pengantin laki-laki telah bekerja, maka majlis berkeyakinan calon mempelai laki-laki akan mampu memberikan nafkah kepada calon istrinya kelak setelah menikah;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Mawar) dengan calon suaminya (XXXXXXXXX) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXX) untuk menikah dengan jejaka yang bernama

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 563/Pdt.P/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXXXXXX);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon seluruhnya sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputus oleh Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabi`ul Akhir 1444 H. dengan Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. sebagai Hakim tunggal, dibantu Muhammad As`ari S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Muhammad As`ari, S.Ag

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00,-
Biaya PNPB Panggilan	:	RP	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	395.000,00,-

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No 563/Pdt.P/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)